

**MODEL PENGEMBANGAN SISTEM KEBIJAKAN TRANSFORMASI
LUMBUNG PANGAN DESA BERBASIS MUTUALIS KAPITAL
SOSIAL DAN GOVERNANCE DI DESA REJO BASUKI DAN
PUJOKERTO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Tesis

Oleh

Ahmad Fajar Adi Pratama



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

MODEL PENGEMBANGAN SISTEM KEBIJAKAN TRANSFORMASI LUMBUNG PANGAN DESA BERBASIS MUTUALIS KAPITAL SOSIAL DAN GOVERNANCE DI DESA REJO BASUKI DAN PUJOKERTO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

AHMAD FAJAR ADI PRATAMA

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model sistem kebijakan transformasi lumbung pangan desa berbasis mutualisme kapital sosial dan tata kelola (*governance*) di Desa Rejo Basuki dan Pujokerto, Kabupaten Lampung Tengah. Model ini dirancang untuk menjawab tantangan ketahanan pangan yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan dinamika sosial-ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode analisis prospektif, penelitian ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui survei, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapital sosial, seperti kepercayaan dan gotong-royong, memainkan peran kunci dalam mendorong keterlibatan masyarakat, sementara tata kelola yang adaptif dan inklusif mendukung pengelolaan sumber daya secara efisien. Model kebijakan ini menekankan pada interaksi dinamis antara kapital sosial dan governance untuk menciptakan sistem lumbung pangan yang tangguh, berketahanan iklim, dan berkelanjutan. Implementasi model ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian pangan lokal, meningkatkan solidaritas masyarakat, dan memastikan distribusi pangan yang merata. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori ketahanan pangan berbasis komunitas dan menawarkan pedoman praktis bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengelola lumbung pangan secara efektif.

Kata Kunci : Lumbung pangan, kapital sosial, tata kelola, ketahanan pangan, Lampung Tengah, kebijakan transformasi.

ABSTRACT

THE POLICY SYSTEM DEVELOPMENT MODEL FOR THE TRANSFORMATION OF VILLAGE FOOD BARNS BASED ON MUTUAL SOCIAL CAPITAL AND GOVERNANCE IN REJO BASUKI AND PUJOKERTO VILLAGES, CENTRAL LAMPUNG REGENCY

By

AHMAD FAJAR ADI PRATAMA

This study aims to develop a policy system model for the transformation of village food barns based on mutual social capital and governance in Rejo Basuki and Pujokerto Villages, Central Lampung Regency. The model addresses food security challenges influenced by climate change, population growth, and socio-economic dynamics. Using a qualitative descriptive approach and prospective analysis method, this research engaged stakeholders through surveys, in-depth interviews, and focused group discussions. Findings indicate that social capital, such as trust and mutual cooperation, plays a pivotal role in fostering community participation, while adaptive and inclusive governance ensures efficient resource management. The proposed policy model emphasizes the dynamic interaction between social capital and governance to create a resilient, climate-adaptive, and sustainable food barn system. The implementation of this model is expected to strengthen local food independence, enhance community solidarity, and ensure equitable food distribution. This study provides significant contributions to community-based food security theory and offers practical guidelines for governments and communities to effectively manage village food barns.

Keywords : *Food barn, social capital, governance, food security, Central Lampung, policy transformation.*

**MODEL PENGEMBANGAN SISTEM KEBIJAKAN TRANSFORMASI
LUMBUNG PANGAN DESA BERBASIS MUTUALIS KAPITAL
SOSIAL DAN GOVERNANCE DI DESA REJO BASUKI DAN
PUJOKERTO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Oleh :

Ahmad Fajar Adi Pratama

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat ntuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Tesis : **MODEL PENGEMBANGAN SISTEM KEBIJAKAN TRANSFORMASI LUMBUNG PANGAN DESA BERBASIS MUTUALIS KAPITAL SOSIAL DAN GOVERNANCE DI DESA REJO BASUKI DAN PUJOKERTO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nama Mahasiswa : **Ahmad Fajar Adi Pratama**

NPM : 2226061007

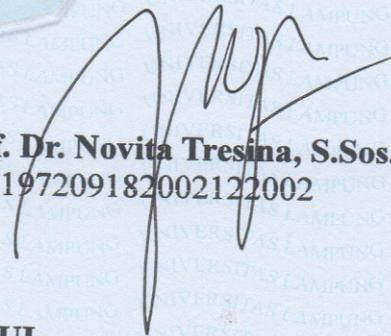
Program Khusus : **Administrasi Publik**

Program Studi : **Magister Ilmu Administrasi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

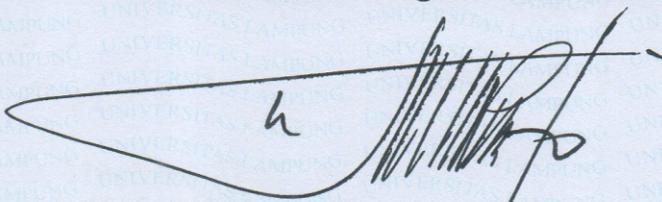



Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 196911032001121002


Prof. Dr. Novita Tresina, S.Sos., M.Si.
NIP 197209182002122002

MENGETAHUI,

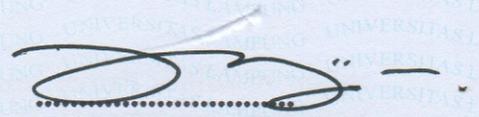
Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi


Dr. Sripto, S.Sos., M.AB.
NIP 196902261990031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.



Sekretaris : Prof. Dr. Novita Tresina, S.Sos., M.Si.



Penguji Utama : Dr. Tunggul Sihombing, M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP 197608212000032001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 20 Desember 2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 Januari 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Ahmad Fajar Adi Pratama
NPM. 2226061007

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Metro pada tanggal 25 Juni 1995. Penulis merupakan putra pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Eko Dian Susanto dan Ibu Wartini. Penulis menempuh pendidikan formal di SD Pertiwi Teladan Kota Metro dan menyelesaikan studinya pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama yaitu SMP Negeri 3 Kota Metro yang diselesaikan pada tahun 2010 dan setelah itu melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas yaitu SMA Negeri 1 Kota Gajah yang diselesaikan pada tahun 2013. Pada tanggal 1 september 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Universitas Lampung. Selanjutnya pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan di Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

MOTO

“Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke pundak lawan, tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala ia marah.”

(Nabi Muhammad SAW)

“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.”

(Abu Bakar Sibli)

“Fokuslah dengan apa yang menjadi tujuan hidupmu, bersabarlah dalam mendapatkan hasil yang sudah kamu kerjakan karena tiap individu memiliki zona waktu yang sudah ditetapkan oleh tuhan, teruslah berusaha dan berjuang serta sykuri apa yang kamu dapatkan.”

(Ahmad Fajar Adi Pratama)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT...

Kupersembahkan Karya sederhana ini kepada:

*Ayah dan Ibu serta Adik-adikku tercinta yang selalu Memberikan yang terbaik
untukku*

*Terima kasih atas segala cinta, pengorbanan, kesabaran, keikhlasan, dan do'a
dalam menanti keberhasilanku.*

Keluarga besar yang senantiasa memberikan dorongan Kepadaku

Teman serta Sahabat yang Selalu Memberi Warna dalam Hidupku

Para Pendidik dan Almamater tercinta...

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Bismillahirrohmanirohim.

Allhamdullillah Hirrobbil Allamin, puji syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita dalam menjalankan kehidupan ini. Tidak lupa salam dan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap ke zaman yang terang seperti saat ini. Segala puji syukur penulis ucapkan atas terselesaikannya skripsi penelitian ini dan mempersembahkannya dalam segala keterbatasan. Tentunya dalam proses penyelesaian penelitian ini, penulis menemui dan merasakan berbagai macam hambatan dan rintangan baik dari dalam maupun dari luar diri penulis. Adapun Beberapa hambatan dan rintangan tersebut penulis anggap sebagai pengalaman serta motivasi yang sangat besar bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Tentunya hal tersebut tidak akan ada dengan sendirinya tanpa bantuan dan motivasi tambahan yang secara ikhlas diberikan kepada penulis oleh berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengutarakan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Suropto., S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi. Terima kasih banyak atas ilmu, bimbingan, dukungan, nasihat dan arahnya selama ini kepada penulis.
2. Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si. selaku dosen pembimbing utama penulis. Terima kasih banyak atas ilmu, bimbingan, dukungan, nasihat dan arahnya selama proses pendidikan hingga penyusunan tesis.
3. Prof. Dr. Novita Tresina, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing kedua penulis. Terima kasih banyak Ibu atas ilmu, bimbingan, arahan, nasihat, dan dukungannya yang sudah diberikan kepada penulis selama proses pendidikan dan penyusunan tesis ini.
4. Bapak Dr. Tunggul Sihombing, M.A. selaku dosen penguji yang telah membantu perbaikan melalui kritik, saran dan masukan kepada penulis

dalam penulisan tesis ini. Terima kasih banyak ibu atas bimbingan dan arahnya kepada penulis demi perbaikan tesis ini.

5. Kepada seluruh Dosen Magister Ilmu Administrasi FISIP Universitas Lampung lainnya. Terima kasih banyak untuk semua ilmunya yang sudah diajarkan kepada penulis.
6. Kepada Staff FISIP Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan.
7. Kepada seluruh teman-teman MIA 2022. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua.
8. Segenap orang-orang yang dikenal dan mengenal serta menyayangi penulis. Terima kasih atas segala doa yang kalian berikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan yang lebih besar untuk Bapak, Ibu dan teman-teman semua. Hanya ucapan terima kasih dan doa yang bisa penulis berikan.

Semoga Tuhan memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis, selama awal penulis menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan tesis ini. Pada akhirnya, penulis menyadari walaupun tesis ini telah disusun dengan sebaik mungkin, tidak akan menutup kemungkinan adanya kesalahan yang mengakibatkan tesis ini belum sempurna, namun penulis sangat berharap tesis ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 20 Januari 2025

Penulis,

Ahmad Fajar Adi Pratama, S.A.N., M.Si.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Umum	8
1.3.2 Tujuan Khusus	8
1.4 Manfaat Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Modal Sosial	9
2.2 Model Formulasi Kebijakan.....	11
2.3 Konsep <i>Trigger</i> and <i>Driver</i>	14
2.4 Lumbung Pangan.	16
2.5 Konsep Agility and Genuine Governance.....	17
2.4 Kerangka Kerja	21

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian	23
3.2 Subjek dan Lokasi	25
3.3 Instrumen Penelitian	25
3.4 Tehnik Analisis Penelitian	26

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Lokasi dan Subjek penelitian	29
a) Kampung Pujokerto	29
b) Kampung Rejo Basuki	31
c) Profil Ketahanan dan Lumbung Desa	34
4.2 Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Sistem Kebijakan Transformasi Lumbung Pangan Desa Berbasis Mutualis Kapital Sosial dan Governance	37
4.3 Desain Skenario Sistem Kebijakan Transformasi Lumbung Pangan.....	42
4.4 Model Kebijakan Transformasi Lumbung Pangan Desa Berketahanan Iklim Berbasis Mutualis Kapital Sosial dan Governance Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan	51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Indeks Ketahanan Pangan Indonesia.....	3
Gambar 2. Kerangka pikir.....	21
Gambar 3. Matrik Pengaruh dan Ketergantungan Antar Faktor.....	26
Gambar 4. Pedoman Skor Pengisian Matrik.....	27
Gambar 5. Peta Desa Pujo Kerto.....	30
Gambar 6. Peta Desa Rejo Basuki	34
Gambar 7. Dimensi-Dimensi Utama dalam Analisis Transformasi Lumbung Pangan Desa Berketahanan Iklim Berbasis Mutualis Kapital Sosial dan Governance.....	41
Gambar 8. Ragam Kebijakan berkaitan Transformasi Lumbung Pangan.....	43
Gambar 9. 10 Faktor-Faktor Penentu keberhasilan Transformasi Lumbung Pangan Berketahanan Iklim	44
Gambar 10. Tingkat pengaruh dan ketergantungan 10 faktor.....	45
Gambar 11. Aktor kunci keberhasilan Transformasi Lumbung Pangan.....	46
Gambar 12. Lima Faktor Kunci keberhasilan Transformasi hasil analisis prospektif.....	47
Gambar 13. Hubungan 5 Faktor Kunci keberhasilan Transformasi	50
Gambar 14. Hasil analisis kapital sosial yang mendukung Transformasi Lumbung Pangan berketahanan Iklim	51
Gambar 15. Model Kebijakan transformasi Lumbung pangan berketahanan iklim menggunakan perspektif kapital sosial dan governance	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2020-2023	2
Tabel 2. Pengaruh langsung antar faktor dalam model sistem kebijakan transformasi lumbung pangan.....	27
Tabel 3. Jumlah Penduduk	29
Tabel 4. Tingkat Pendidikan	29
Tabel 5. Mata Pencaharian Penduduk.....	30
Tabel 6. Jumlah Penduduk Tiap Dusun	31
Tabel 7. Mata Pencaharian Penduduk Kampung Rejo Basuki	32
Tabel 8. Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	33
Tabel 9. Faktor Faktor Keberhasilan/Kinerja Sistem kebijakan	38
Tabel 10. Lima Faktor Prospektif Terpilih Transformasi Lumbung Pangan.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling penting, yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan eksistensinya. Setiap negara, memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup dan bergizi bagi seluruh penduduknya. Terjadinya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 telah berkembang menjadi salah satu krisis global pada bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial global yang secara signifikan dapat meningkatkan jumlah orang yang menderita kerawanan pangan dan kelaparan. Penyebaran Covid-19 dikhawatirkan dapat berdampak pada kesehatan dan mata pencaharian di negara-negara berkembang dan menimbulkan masalah yang lebih besar dengan mengganggu ketahanan pangan dan sektor pertanian (Workie et,al. 2020).

Selain pandemi Covid-19 dampak dari adanya perubahan iklim global, seperti perubahan intensitas, durasi dan frekuensi curah hujan; Kondisi cuaca ekstrem; suhu lebih tinggi; perbedaan signifikan dalam sinar matahari; peningkatan emisi gas rumah kaca yang dapat berdampak pada pertanian, hutan, dan sumber daya alam lainnya. Suhu global yang diperkirakan akan meningkat sebesar 2-3°C antara tahun 2030 dan 2050, akan mengurangi hasil panen global dari tanaman utama seperti beras, jagung, dan gandum. Selain itu, perubahan iklim telah menyebabkan perubahan signifikan pada tanggal tanam dan panen, yang mengakibatkan perubahan musim tanam karena variabilitas dan ketidakpastian curah hujan dan suhu, sehingga berdampak pada permintaan pangan (Ansari et,al. 2021).

Pada tahun 2022, ancaman krisis pangan global juga diperparah dengan munculnya konflik geopolitik di berbagai kawasan di dunia, termasuk perang di Ukraina. Hambatan perdagangan internasional pangan dan pupuk yang berasal dari kawasan Laut Hitam semakin memperparah krisis pangan global. Para

pemimpin G20 menyadari besarnya tantangan yang ada untuk menyepakati pertemuan mereka di Bali pada tahun 2022 tentang perlunya mengambil tindakan nyata untuk mengembangkan sistem pertanian dan pangan yang lebih berketahanan dan berkelanjutan untuk mengurangi risiko krisis pangan global (Kementerian Luar Negeri, 2022). Di sisi lain, sekitar 25% lahan pertanian di seluruh dunia mengalami degradasi berat, sumber daya alam dan lingkungan hidup semakin rusak. Jika tidak dilakukan tindakan apa pun, terdapat kekhawatiran bahwa hal ini dapat menurunkan kapasitas produksi pangan global. Akibatnya, membawa ancaman risiko krisis pangan dan malnutrisi yang besar (Chasek 2022 dalam Tono, et.al. 2023).

Indonesia dengan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, sehingga mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan setiap tahunnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia antara tahun 2020 hingga 2023 telah mencapai 278 juta jiwa (BPS, 2023).

Tabel 1
Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa)
2020	270 203,9
2021	272 682,5
2022	275.733,8
2023	278. 696,2

Sumber: BPS 2023

Dengan kondisi tersebut, ketahanan pangan menjadi aspek yang sangatlah penting untuk diperhatikan, terutama bagi negara dengan jumlah penduduk besar seperti Indonesia. Berdasarkan data *Global Security Index* (2022), ketahanan pangan Indonesia pada 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya berada di level 60,2. Namun, angka tersebut masih di bawah rata-rata dunia. Sehingga, ketahanan pangan Indonesia masih perlu ditingkatkan lagi.

Gambar 1.
Indeks Ketahanan Pangan Indonesia (2012–2022)



Sumber: GFSI 2022 dalam (Tranggono, 2023)

Dalam upaya menjaga ketersediaan pangan nasional, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan ketahanan pangan melalui penerbitan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan. Undang-undang ini menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dari tingkat nasional hingga perseorangan, yang ditandai dengan tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas yang baik, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan juga harus sesuai dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga memungkinkan setiap individu untuk hidup sehat, aktif, produktif, dan berkelanjutan (Saragih, 2017 dalam Hulu et al., 2022).

Selain itu, Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat yang sesuai dengan kearifan lokal. Ketahanan pangan merupakan salah satu prasyarat dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, di samping prasyarat lain, dalam

rangka mencapai kesejahteraan masyarakat (Purwanto, 2022 dalam Hulu et al., 2022).

Swasembada dalam kebutuhan pokok, terutama beras, selalu menjadi fokus utama kebijakan pemerintah dan pandangan masyarakat, meskipun ada berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan produksi komoditas ekspor. Swasembada, serta ketahanan pangan dalam bentuk apa pun, berarti mempersiapkan cadangan untuk masa depan, khususnya untuk menghadapi masa-masa sulit seperti pandemi Covid-19. Konsep lumbung, sembako, dan swasembada secara bersamaan mencerminkan model ketahanan pangan di seluruh Indonesia yang didasarkan pada sistem penyimpanan panen dan distribusi surplus. Pola pikir ini, yang dapat disebut sebagai lumbung-kompleks, lazim di masyarakat agraris, terutama di seluruh Asia, namun memiliki karakteristik khas Indonesia. Pemikiran ini hadir di berbagai tingkatan, mulai dari rumah tangga dan desa hingga bangunan bersejarah kekaisaran, dan terus muncul dalam gerakan petani dan aktivis modern, serta dalam kebijakan dan praktik ketahanan pangan yang diterapkan dalam penelitian dan administrasi pertanian masa kini (Graeme MacRae & Thomas Reuter, 2020).

Sistem pangan tradisional di Indonesia telah lama bergantung pada hasil panen musiman yang disimpan dalam bangunan yang dikenal sebagai lumbung atau *granari* dalam bahasa Inggris. Bangunan ini umumnya memiliki atap pelana yang curam untuk mengalirkan air hujan dan didirikan di atas tiang untuk melindungi dari banjir serta hewan seperti tikus. Lumbung di berbagai daerah di nusantara hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan meskipun memiliki sebutan berbeda dalam bahasa daerah, istilah umum yang digunakan dalam bahasa Indonesia adalah lumbung. Dalam ekonomi berbasis lingkungan yang mengandalkan tanaman pangan lokal, setiap individu memiliki lumbung, baik di tingkat rumah tangga maupun secara kolektif (Graeme MacRae & Thomas Reuter, 2020).

Pemikiran mengenai lumbung telah dikritik oleh industri pangan, lembaga pembangunan, dan pemerintah sebagai pendekatan yang dianggap usang dalam ekonomi global saat ini. Mereka berpendapat bahwa negara-negara seperti Indonesia seharusnya mengadopsi pendekatan yang lebih berorientasi pada pasar (OECD 2015 dalam Graeme MacRae & Thomas Reuter, 2020). Namun, penolakan terhadap kritik ini di berbagai tingkatan di Indonesia menunjukkan bahwa konsep lumbung tetap kuat dan berakar dalam, atau dengan kata lain, Indonesia adalah sebuah negara lumbung (Graeme MacRae & Thomas Reuter, 2020).

Setelah diterapkannya kebijakan revolusi hijau dan terbentuknya Badan Urusan Logistik Nasional (Bulog), peran lumbung pangan masyarakat mengalami penurunan signifikan. Revolusi hijau, dengan fokus pada peningkatan produksi pangan melalui penggunaan teknologi modern, pupuk kimia, dan varietas unggul, mengubah pola pertanian tradisional di Indonesia. Bulog yang memiliki misi utama memastikan ketahanan pangan secara umum dan menjaga keandalan serta pasokan bahan pokok.

Bulog menjelaskan berbagai kegiatan dan programnya, termasuk penyediaan beras bersubsidi bagi masyarakat miskin, serta upayanya membangun citra sebagai perusahaan perdagangan yang dinamis daripada sekadar badan pemerintah. Ini mencerminkan model ketahanan pangan yang dipimpin oleh pasar. Namun, yang tidak dijelaskan secara jelas bahwa cara Bulog mencapai tujuan ini adalah melalui intervensi pasar, yaitu dengan membeli dan menyimpan bahan pokok, terutama beras, di gudang-gudang besar di seluruh negeri sebagai cadangan darurat. Bulog kemudian merilis stok ini secara strategis ke pasar melalui jaringan distribusi untuk membantu menstabilkan harga. Di balik pendekatan berbasis pasar ini, terdapat praktik yang mencerminkan konsep lumbung tradisional. Setiap akhir musim panen, terutama menjelang masa dengan permintaan tinggi seperti Ramadan, media sering melaporkan cadangan Bulog yang cukup besar serta jaminan stabilitas pasokan dan harga (Graeme MacRae & Thomas Reuter, 2020).

Lumbung dianggap sebagai prototipe sistem ketahanan pangan tingkat desa yang berfungsi dengan baik sebagai tempat penyimpanan dalam menjamin stabilitas ketersediaan, yang mana hasil yang banyak menyebabkan penurunan harga komoditi dengan begitu lumbung pangan berfungsi untuk mengatur penjualan hingga petani memperoleh harga yang lebih tinggi (Lozada, 2014; Heriawan, 2018 dalam Hulu et al., 2022).

Pendekatan yang selama ini digunakan untuk mencapai tujuan ketahanan pangan melalui lumbung pangan telah menyebabkan pergeseran nilai-nilai serta sistem sosial yang membentuk modal sosial masyarakat. Nilai-nilai tersebut kemudian digantikan oleh pranata-pranata modernisasi dan global yang hanya memberikan integritas semu. Pandangan pemerintah terhadap lumbung desa seringkali dikaitkan dengan kemiskinan dan kerawanan pangan. Akibatnya, lumbung desa secara bertahap ditekan dan tidak didorong untuk berkembang, padahal peranannya penting dalam menciptakan ketahanan pangan. Intervensi ini, meskipun bertujuan untuk meningkatkan efisiensi distribusi pangan, kadang-kadang tidak mempertimbangkan kearifan lokal dan praktik tradisional yang sudah lama ada di masyarakat, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam distribusi manfaat pembangunan (Hartatik Endah Sri et al., 2023).

Kegagalan berulang dalam pengembangan lumbung pangan sering kali ditandai oleh marginalisasi peran masyarakat, petani lokal, serta pengabaian nilai-nilai lokal dalam tata kelola lumbung pangan. Isu utama yang muncul adalah kurangnya perhatian terhadap konteks sosiokultural setempat dan upaya penerapan model lumbung pangan yang seragam. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut serta menurunkan citra tata kelola lumbung pangan secara keseluruhan (Bezner Kerr, R, et al. 2022).

Hilangnya partisipasi aktif masyarakat seiring dengan memudarnya pola hubungan sosial telah membawa dampak serius, termasuk munculnya sikap apatis di kalangan petani dan meningkatnya perilaku konsumtif. Dominasi ekonomi global semakin nyata, ditandai dengan berkembangnya model kelembagaan keuangan yang mengesampingkan prinsip-prinsip lokal. Hal ini tidak hanya melemahkan modal sosial, tetapi juga secara perlahan mengikis kearifan pangan lokal, perlu ada keseimbangan antara sistem modern yang dikelola oleh negara dan sistem tradisional yang dimiliki masyarakat. Menghidupkan kembali fungsi lumbung pangan tradisional bisa menjadi salah satu langkah strategis untuk mencapai stabilitas pangan yang lebih baik di Indonesia dengan memanfaatkan modal sosial yang ada di masyarakat (Pramudita Merissa et al., 2020)

Modernisasi sektor pangan melalui teknologi dan kebijakan pasar sering kali mengabaikan nilai-nilai lokal dan modal sosial masyarakat. Penurunan fungsi lumbung pangan tradisional juga menyebabkan berkurangnya partisipasi aktif masyarakat, melemahnya hubungan sosial, dan meningkatnya sikap apatis, terutama di kalangan petani. Padahal, modal sosial seperti gotong-royong, kearifan lokal, dan nilai-nilai kolektivitas merupakan elemen penting dalam menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan (Nurjaya & Nyoman, 2007 dalam Karyadi, 2021).

Desa Pujo Kerto dan Rejo Basuki di Kabupaten Lampung Tengah menjadi contoh lokasi yang menghadapi tantangan ketahanan pangan. Pengembangan model transformasi lumbung pangan berbasis kapital sosial dan tata kelola (*governance*) menjadi penting untuk memastikan ketahanan pangan di tingkat lokal. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan optimalisasi sumber daya tradisional, tetapi juga memanfaatkan potensi lokal untuk membangun sistem yang berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan modern. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model kebijakan transformasi lumbung pangan desa berbasis mutualisme kapital sosial dan *governance* di Desa Pujo Kerto dan Rejo Basuki. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat terwujud sistem ketahanan pangan yang lebih inklusif, berdaya tahan, dan berkelanjutan di tingkat lokal hingga nasional.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang akan penulis teliti yaitu bagaimana kapital sosial dan tata kelola (*governance*) berinteraksi melalui *mutualisme* kapital sosial untuk mendukung transformasi lumbung pangan desa yang berkelanjutan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme sosial dan kearifan lokal-pangan sebagai kapital sosial komunitas. Untuk mengembangkan model lumbung pangan berbasis kapital sosial komunitas yang berlokasi di desa Pujokerto dan Rejo Basuki di Kabupaten Lampung Tengah.

2) Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai Transformasi Lumbung Pangan di Daerah dengan mendorong mekanisme sosial dan kearifian lokal pangan.

b. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengembangkan model lumbung pangan dengan mekanisme kapital sosial dan kearifian lokal sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Modal Sosial

Memahami cara kerja modal sosial dalam suatu komunitas dapat memberikan landasan untuk mengetahui di mana dan bagaimana berinvestasi dalam pengembangan masyarakat. Modal sosial mendefinisikan jenis kerjasama antar aktor dan memfasilitasi saling mendukung. Teori modal sosial kini banyak digunakan dalam bidang inovasi pertanian (misalnya Fisher, 2013; Tregear dan Cooper, 2016; King et al., 2019 dalam Baravoa et al., 2019). Coleman melihat modal sosial lebih dari sekedar modal fisik dan manusia (1988) dalam (Santoso, 2020): “Sama seperti modal yang dihasilkan dari perubahan fisik dalam produksi alat-alat yang memfasilitasi produksi, maka modal manusia dihasilkan dari perubahan orang-orang yang memberikan keterampilan dan kemampuan yang memungkinkan untuk bertindak dengan cara-cara baru.

Menurut Bourdieu (1986) dan Li, Savage, dan Warde (2008) dalam (Jail Payan K et al., 2019) Modal sosial terdiri dari hubungan sosial yang dapat dimanfaatkan atau dimanfaatkan dalam menetapkan tujuan ekonomi dan membantu wirausahawan (sosial) untuk mendapatkan kepercayaan individu dan kelompok. Cohen dan Prusak (2001) (dalam Santoso, 2020) mengatakan modal sosial terdiri dari banyak hubungan kerja antar manusia: kepercayaan, pemahaman, dan nilai bersama serta perilaku yang mengikat anggota masyarakat dan komunitas yang mendukung tindakan kooperatif.

Woolcock dan Narayan (2000: 3) (dalam Baravoa et al., 2019) menekankan pentingnya modal sosial. “Yang penting bukan apa yang Anda ketahui, tapi siapa yang Anda kenal,” kata mereka dan menjelaskan:

“Gagasan dasar modal sosial adalah bahwa keluarga, teman, dan kolega merupakan sumber daya yang penting, sumber daya yang dapat digunakan dalam krisis, dinikmati demi kepentingan sendiri dan memanfaatkannya demi keuntungan materi. Terlebih lagi, ini berlaku untuk individu, tetapi hal yang sama juga berlaku untuk kelompok. Demikian pula Putnam (2000) (dalam Baravoa et al., 2019) berpendapat bahwa modal sosial adalah persediaan kepercayaan sosial, jaringan dan nilai yang dapat digunakan masyarakat untuk meningkatkan kehidupan mereka serta mencapai tujuan bersama.

Prinsip dasarnya adalah bahwa interaksi memungkinkan terjadinya pembangunan dalam masyarakat, bekerja sama, dan jalinan struktur sosial. perasaan saling memiliki (*sense of belonging*) dan pengalaman jaringan sosial (dan hubungan kepercayaan dan toleransi) yang menciptakan kepercayaan di antara masyarakat.

Kepercayaan antar individu-individu menjadikan kepercayaan diantara orang asing dan kepercayaan pada lembaga-lembaga sosial yang lebih luas. kepercayaan pada akhirnya menjadi tatanan nilai bersama, kemanfaatan dan ekspektasi dalam masyarakat secara masif. Tanpa adanya interaksi ini , kepercayaan akan hilang. Singkatnya, modal sosial adalah teori yang membantu kolaborasi dan membangun hubungan saling percaya di antara anggota masyarakat, yang dapat mempengaruhi hasil positif dalam komunitas mereka. Ada yang mungkin berargumentasi bahwa memiliki berbagai bentuk modal sosial merupakan langkah awal yang diperlukan untuk menciptakan kondisi bagi anggota masyarakat untuk mengambil langkah-langkah dalam membela dan melindungi kepentingan mereka.

Studi yang dilakukan oleh Pierre Bourdieu (1986), Francis Fukuyama (1995, 1999), dan Robert Putnam (1993, 2000) (dalam Santoso Thomas, 2020), menunjukkan bahwa negara yang memiliki modal sosial yang tinggi mampu dan berhasil menyelesaikan persoalan yang dihadapi dengan solusi yang lebih baik dibanding negara yang memiliki modal sosial rendah. Modal sosial tersebut meliputi tiga elemen penting yaitu norma sosial, kepercayaan, dan jaringan sosial. Norma sosial yang perlu dibangun dalam hubungan masyarakat-pemerintah adalah kepercayaan, akuntabilitas, kemitraan, partisipasi, dan responsivitas; sedangkan dalam hubungan antar masyarakat warga adalah solidaritas, toleransi, kepercayaan, dan kerjasama.

2.2 Model Formulasi Kebijakan Thomas R.Dye

Menurut Thomas R. Dye (1995) dalam (Kadji Yulianto, 2015) yang menjelaskan bahwa formulasi kebijakan merupakan upaya pemerintah untuk campur tangan dalam kehidupan publik guna menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Campur tangan ini dapat bersifat memaksa, karena pemerintah memiliki wewenang yang bersifat otoritatif.

Model Teori Rasional (*Rational*) menekankan bahwa kebijakan publik harus menghasilkan manfaat sosial yang maksimal. Artinya, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus mampu memilih kebijakan yang memberikan keuntungan terbesar bagi masyarakat. Dalam proses penyusunan kebijakan, keputusan yang diambil harus didasarkan pada perhitungan rasional antara pengorbanan dan hasil yang diharapkan, sehingga model ini lebih mengutamakan aspek efisiensi dan ekonomi.

Pendekatan teori rasional menekankan bahwa kebijakan bertujuan untuk mencapai "manfaat sosial maksimum," di mana pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan pendidikan yang memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat. Proses perumusan kebijakan harus mengutamakan keputusan yang berdasarkan pertimbangan rasional. Rasionalitas ini didasarkan pada perbandingan antara pengorbanan yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, pendekatan rasional lebih fokus pada aspek efisiensi dan nilai ekonomis. Adapun langkah-langkah dalam formulasi kebijakan ini meliputi:

a) Mengidentifikasi preferensi dan kecenderungan publik.

Langkah awal ini melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan, keinginan, dan pandangan masyarakat. Pemerintah harus mengumpulkan data tentang preferensi publik melalui berbagai metode, seperti survei, konsultasi publik, atau studi sosial. Tujuannya adalah memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan relevan dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Preferensi publik ini penting untuk menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan.

b) Menemukan berbagai alternatif pilihan.

Setelah preferensi publik diidentifikasi, pemerintah perlu mengeksplorasi berbagai alternatif kebijakan yang bisa diterapkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Proses ini melibatkan kajian terhadap pilihan yang tersedia, baik yang sudah diterapkan di masa lalu maupun solusi baru yang kreatif. Setiap alternatif harus dianalisis secara mendalam agar ada pilihan yang beragam dalam menangani masalah yang dihadapi.

c) Menilai konsekuensi dari setiap pilihan.

Setiap alternatif kebijakan pasti memiliki dampak tertentu, baik yang positif maupun negatif. Pada tahap ini, pemerintah perlu mengevaluasi konsekuensi dari setiap opsi yang tersedia. Penilaian ini mencakup analisis dampak kebijakan terhadap berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik. Dengan memahami konsekuensinya, pemerintah dapat memprediksi bagaimana kebijakan tersebut akan mempengaruhi masyarakat dan apakah kebijakan itu dapat mencapai tujuannya.

d) Mengukur rasio sosial yang harus dikorbankan.

Langkah ini menekankan pentingnya mengevaluasi biaya sosial yang mungkin timbul akibat penerapan kebijakan tertentu. Rasio sosial yang dikorbankan mencakup sumber daya yang harus dialokasikan, baik dari segi waktu, tenaga, uang, atau potensi hilangnya kesempatan di sektor lain. Analisis ini memastikan bahwa manfaat yang diperoleh dari kebijakan lebih besar daripada pengorbanan yang dilakukan, sehingga efisiensi tetap terjaga.

e) Memilih alternatif kebijakan yang paling efektif.

Setelah semua alternatif dievaluasi, langkah terakhir adalah memilih kebijakan yang paling efektif, yaitu yang menawarkan manfaat terbesar dengan pengorbanan terkecil. Keputusan ini didasarkan pada hasil penilaian rasionalitas yang sudah dilakukan di langkah-langkah sebelumnya. Kebijakan yang dipilih harus tidak hanya efisien tetapi juga dapat diterapkan secara realistis dan sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang ada.

2.3 Konsep Trigger and Driver

Dari beberapa definisi, kita dapat melihat bahwa istilah "pemicu" dan "penggerak" memiliki makna yang cukup mirip dalam konteks penyebab suatu peristiwa atau aksi. Pemicu secara umum merujuk pada sesuatu yang menyebabkan sesuatu yang lain terjadi, sedangkan penggerak menekankan pada memberikan gerakan maju dan berkelanjutan, sering kali dengan menekankan efek dorongan atau motivasi. Dengan demikian, secara umum, kita bisa menggambarkan "pemicu" sebagai sesuatu yang memulai atau menyebabkan terjadinya suatu peristiwa atau tindakan, sedangkan "penggerak" lebih menekankan pada memberikan dorongan atau motivasi yang mendorong perubahan atau tindakan yang berkelanjutan.

Sebagaimana definisi dari beberapa ahli, Kata trigger dan driver dapat didefinisikan berdasarkan definisi kata-katanya. Pemicu tidak hanya berarti "tuas pada senjata", tetapi secara umum berarti "sesuatu yang menyebabkan sesuatu yang lain terjadi". Sebagai kata kerja, *trigger* berarti "menyebabkan (sesuatu) dimulai atau terjadi" (Merriam-Webster, 2016 dalam Savolainen, 2017). Begitu pula dengan *drive* dan *driver* mempunyai banyak arti. Misalnya, berkendara dapat berarti "mengarahkan pergerakan sebuah kendaraan" dan "menggerakkan atau mempertahankan" (Merriam-Webster, 2016 dalam Savolainen, 2017). Secara umum, kata kerja penggerak menyiratkan "memberikan gerakan maju, berkelanjutan, dan menekankan pada efek dorongan". Pengemudi tidak hanya mengacu pada seseorang yang dapat mengendarai "mobil, truk, dll. namun, secara umum berarti "seseorang yang memberikan dukungan atau motivasi" (Merriam-Webster, 2016 dalam Savolainen, 2017).

Dalam konteks transformasi lumbung pangan desa, konsep "*trigger*" dan "*driver*" akan memiliki implikasi yang spesifik terkait dengan tujuan tersebut. Sebagaimana berikut:

1) *Trigger* (Pemicu):

Pemicu dalam konteks ini bisa berupa kondisi atau peristiwa tertentu yang memicu kesadaran akan pentingnya transformasi lumbung pangan desa menuju ketahanan pangan berkelanjutan. Misalnya, pemicu dapat berupa:

- Krisis pangan lokal yang menunjukkan kerentanan sistem pangan desa terhadap perubahan iklim, bencana alam, atau ketidakstabilan ekonomi.
- Kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya meningkatkan produksi pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan.
- Dorongan dari organisasi internasional atau lembaga donor untuk mengembangkan model pertanian berkelanjutan di daerah pedesaan.

2) *Driver* (Penggerak):

Penggerak dalam konteks ini merujuk pada faktor-faktor yang aktif mendorong atau memotivasi transformasi lumbung pangan desa berbasis mutualis kapital dan governance. Ini bisa termasuk:

- Kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan infrastruktur pertanian, penyediaan akses ke pasar, dan investasi dalam pelatihan petani untuk menerapkan praktik pertanian berkelanjutan.
- Keterlibatan aktif masyarakat desa dalam mendirikan koperasi atau organisasi mutualis untuk meningkatkan akses modal, berbagi sumber daya, dan memperkuat daya tawar bersama.
- Sistem governance yang inklusif dan partisipatif, di mana masyarakat desa, pemerintah lokal, dan pemangku kepentingan lainnya bekerja sama dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program ketahanan pangan.

Dengan memahami pemicu dan penggerak dalam konteks ini, pemerintah, masyarakat desa, dan pemangku kepentingan lainnya dapat merancang strategi yang holistik dan berkelanjutan untuk mencapai transformasi lumbung pangan desa yang lebih kuat dan mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

2.4 Lumbung Pangan

Menurut Rachmat dkk. (2010) (dalam Wulansari et al., 2021), Lumbung pangan merupakan cadangan pangan yang berfungsi untuk menjaga stok pangan rumah tangga selama periode tertentu. Lumbung pangan ini memiliki peran penting dalam mengatasi kerawanan pangan, terutama saat terjadi bencana kelaparan, serta membantu anggota masyarakat menyediakan modal (Prasmatiwi et al., 2013 dalam Wulansari et al., 2021). Selain itu, lumbung desa juga dapat berperan dalam membangun petani mandiri dan pertanian berkelanjutan. Bahan pangan yang disimpan di lumbung menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup hingga musim berikutnya dan membantu petani mengatasi kemungkinan kerawanan pangan jika terjadi gagal panen (Faqih & Rohayati, 2016 dalam Wulansari et al., 2021).

Lumbung pangan merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat pedesaan, kabupaten/kota, dengan tujuan untuk mengembangkan penyediaan persediaan pangan. Lembaga ini berfungsi untuk menunda penjualan, menyimpan, mendistribusikan, mengolah, dan memperdagangkan bahan pangan yang dikelola secara berkelompok (Yuroh, 2015 dalam Wulansari et al., 2021). Menurut Kusumowardini yang dikutip oleh Tias S. (2012) (dalam Wulansari et al., 2021), istilah lumbung pangan telah dikenal luas oleh masyarakat di berbagai daerah. Lumbung pangan seringkali dikonotasikan sebagai lumbung kelaparan, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bagi petani pada musim kelaparan untuk meminjam gabah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Keberadaan lumbung pangan menjadi salah satu alternatif lembaga yang diupayakan untuk menggantikan lembaga-lembaga lokal yang kini

banyak mengalami kehancuran. Lumbung pangan sangat diperlukan pada saat terjadi bencana kelaparan dan juga menjadi alternatif pemberian modal bagi petani (Faqih & Rohayati, 2016; Rachmat et al., 2016 dalam Wulansari et al., 2021).

Jadi dapat disimpulkan pernyataan tersebut adalah bahwa lumbung pangan memainkan peran vital dalam memastikan ketersediaan pangan dan stabilitas ekonomi di masyarakat pedesaan. Lumbung pangan tidak hanya berfungsi sebagai cadangan pangan untuk mengatasi kerawanan pangan dan bencana kelaparan, tetapi juga membantu dalam menyediakan modal bagi petani. Lembaga ini didirikan oleh masyarakat untuk mengelola persediaan pangan secara berkelompok, menunda penjualan, menyimpan, mendistribusikan, mengolah, dan memperdagangkan bahan pangan. Lumbung pangan juga dikenal sebagai "lumbung kelaparan," yang memberikan pinjaman gabah kepada petani pada musim kelaparan. Secara keseluruhan, lumbung pangan merupakan solusi penting dalam menggantikan lembaga-lembaga lokal yang telah mengalami kehancuran, serta mendukung petani menuju kemandirian dan keberlanjutan pertanian.

2.5 Konsep Agility and Genuine Governance

Dalam lingkungan yang berubah dengan cepat saat ini, tata kelola tetap menjadi kunci dalam merespons, mengelola, dan mengambil keputusan terkait perubahan lingkungan. Tata Kelola (*governance*) memegang peranan penting dalam meningkatkan dan mempertahankan daya saing. *Governance* berkaitan dengan kemampuan mengarahkan (*to steer*) urusan dalam negeri suatu negara (Bloom, 1991 dalam Malik Ihyani et al., 2023).

Pada tahun 1990-an, konsep sistem penjaminan mutu terpadu (*Total Quality Management*, TQM) yang diterapkan dalam organisasi bisnis mulai diadopsi dalam organisasi publik melalui pendekatan yang dikenal sebagai kewirausahaan birokrasi. Konsep ini diperkenalkan dalam literatur oleh Osborne dan Gaebler (1993) dalam (Malik Ihyani et al., 2023) yang berjudul "*Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*". Buku ini menekankan pentingnya mengubah birokrasi publik yang kaku menjadi lebih dinamis dan responsif seperti perusahaan swasta.

Dalam dekade berikutnya, literatur tentang manajemen sektor publik mengalami perkembangan lebih lanjut dengan munculnya konsep *New Public Management* (NPM). NPM berfokus pada penerapan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta dalam sektor publik untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja keseluruhan organisasi publik. Beberapa elemen kunci dari NPM termasuk pengelolaan berbasis kinerja, desentralisasi, orientasi pada hasil, dan pemberdayaan manajer publik untuk bertindak lebih seperti pengusaha. Namun, meskipun NPM berkontribusi pada peningkatan kinerja di beberapa organisasi publik, di banyak negara implementasinya menghadapi berbagai tantangan dan kegagalan (Nugroho, 2008 dalam Malik Ihyani et al., 2023).

Belakangan ini muncul keinginan untuk menerapkan program manajemen khusus berbasis tata kelola yang baik pada lembaga publik. Perbedaannya dengan paradigma sebelumnya adalah fokus pemikirannya tidak hanya pada penciptaan sistem pengelolaan dan kelembagaan yang bertanggung jawab dalam adaptasi perubahan iklim yang lebih efisien dan hati-hati, namun juga beradaptasi terhadap tantangan dan peluang Revolusi Industri 4.0.

Instansi pemerintah diharapkan memiliki sistem manajemen yang lebih baik dan memanfaatkan teknologi informasi secara lebih luas dan efisien, seperti analisis big data dan prediksi ancaman keamanan. Banyak negara kini ingin menciptakan sistem pelayanan publik yang efisien, murah dan cepat, namun juga berlandaskan humanis dan berfokus pada kemaslahatan warga (Kumorotomo, 2019).

Dalam era yang cepat berubah dan dinamis, konsep tata kelola dinamis (*dynamic governance*) menjadi sangat penting. Neo dan Chen (2007) dalam (Malik Ihyani et al., 2023) menekankan bahwa pemerintahan yang dinamis adalah yang mampu mengakselerasi pilihan-pilihan kebijakan berdasarkan perkembangan terbaru dalam lingkungan yang terus berubah, sehingga kebijakan dan lembaga pemerintah tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan jangka panjangnya.

Tata kelola pemerintah dinamis (*dynamic governance*) merupakan landasan penting dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan organisasi publik yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Kemampuan untuk beradaptasi dan responsif terhadap perubahan menjadi faktor esensial bagi organisasi publik dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan (Mudiyati, 2019). Organisasi perlu memberikan respon yang cepat dan tepat untuk menghindari tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, konsep *Agile Governance* menjadi sangat penting untuk diterapkan, terutama dalam era disrupsi saat ini (Kozlowski dkk, 2009 dalam Vernanda, 2020).

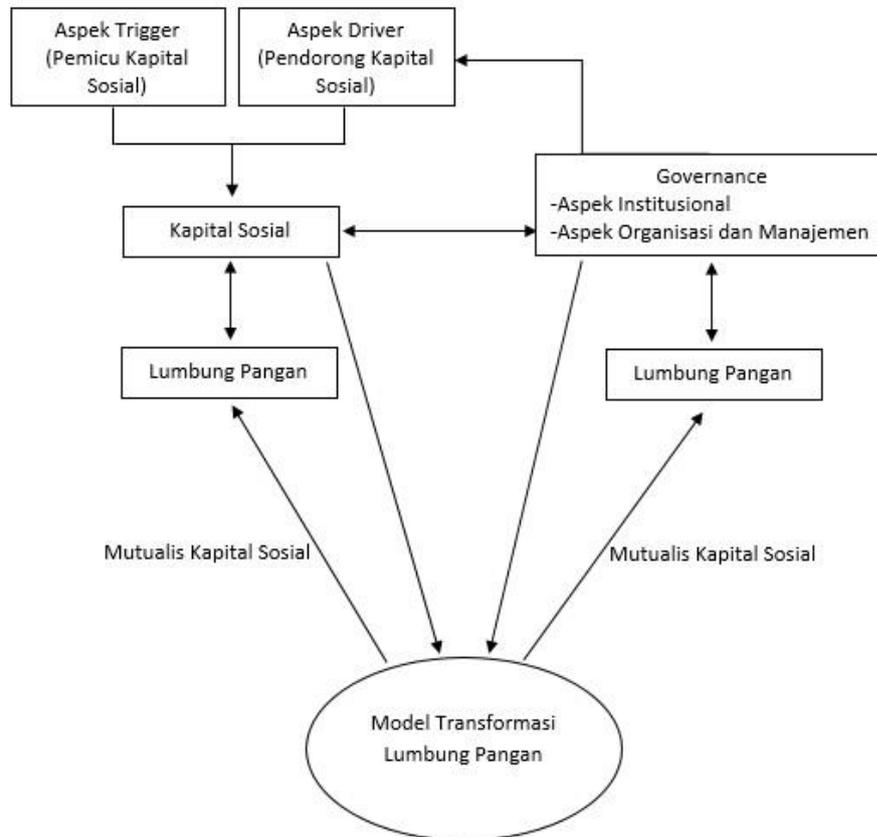
Konsep *agility governance* awalnya merupakan konsep populer dalam pengembangan perangkat lunak, kemudian konsep ini diadaptasi ke bidang lain dan lambat laun mulai dikenal dalam studi organisasi. Konsep *agility* menekankan pentingnya kecepatan, gesit dan fleksibilitas (Janssen dan Voort, 2020). Secara berkelanjutan, sikap gesit serta berjalannya fungsi evaluasi sebagai perbaikan pola kerja dapat meningkatkan performa organisasi. Konsep *agility* mengharuskan organisasi untuk cepat gagal, segera bangkit, dan cepat belajar dari kesalahan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk terus beradaptasi dan meningkatkan efisiensi serta efektivitasnya. Penerapan konsep *agile* diharapkan dapat mengubah birokrasi konvensional yang sering kali lamban dalam merespons perubahan menjadi lebih responsif dan adaptif (Winanti, 2020 dalam Malik Ihyani et al., 2023).

Selain itu, *Agile Governance* juga dimaksudkan sebagai kemampuan suatu organisasi untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam meraih peluang, menjadikan tindakan-tindakan inovatif dan kompetitif, serta yang utama melakukan efisiensi biaya (Huang dkk., dalam Vernanda, 2020). *Agile governance* adalah kemampuan organisasi untuk memahami, beradaptasi, dan merespons perubahan lingkungan dengan cepat dan berkelanjutan dengan menggabungkan kekuatan tangkas dan kemampuan tata kelola (*governance*) untuk memberikan nilai yang lebih cepat, efisien, dan lebih baik pada proses bisnis birokrasi (Luna, A.J.H. de O dkk., 2015).

Pandangan dari para ahli tersebut memberikan gambaran yang kaya tentang konsep *Genuine Governance*, menyoroti berbagai dimensi yang penting untuk membangun sistem tata kelola yang baik dan berdaya. Dengan memahami perspektif-perspektif ini, kita dapat lebih baik memahami kompleksitas dan tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip *Genuine Governance* dalam konteks pemerintahan dan pengelolaan organisasi.

2.6 Kerangka Kerja

Model Sistem Kebijakan Untuk Transformasi Lumbung Pangan Desa Berbasis Mutualis Kapital Sosial dan Governance



Gambar 2. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini menjelaskan bagaimana kapital sosial dan *governance* berkontribusi terhadap transformasi lumbung pangan. Konsep mutualisme menyoroti bagaimana kapital sosial yang kuat memungkinkan tata kelola yang lebih inklusif dan efisien, sementara tata kelola yang baik memperkuat kapital sosial dengan menciptakan kepercayaan dan keterlibatan yang lebih besar.

Dalam model ini, kapital sosial desa yang kuat, ditandai oleh jaringan sosial yang baik dan kerja sama kolektif, akan memperkuat transformasi lumbung pangan dengan menciptakan solidaritas dalam pengelolaan pangan. Governance yang baik akan mendukung keberlanjutan lumbung pangan melalui pembuatan kebijakan yang inklusif dan berbasis partisipasi masyarakat. Mutualisme antara kapital sosial dan governance memungkinkan desa mengelola lumbung pangan secara efektif dan efisien, dengan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Hal ini menunjukkan bagaimana kapital sosial dan governance dapat saling mendukung dalam membangun lumbung pangan desa yang berkelanjutan dan berketahanan iklim. Model ini juga menggambarkan pentingnya interaksi antara dua variabel tersebut dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan dan sosial.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Model Sistem Kebijakan Transformasi Lumbung Pangan Desa Berbasis Mutualis Kapital Sosial dan Governance menekankan pentingnya kapital sosial dan governance dalam mengelola lumbung pangan desa secara efektif dan berkelanjutan. Kapital sosial (kepercayaan, jaringan, kerja sama) didorong oleh pemicu dan pendorong sosial, sedangkan governance mencakup aspek institusional dan manajemen yang memastikan keteraturan, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Mutualisme sosial menghubungkan keduanya, memperkuat hubungan sosial dan pengelolaan yang baik untuk menciptakan model transformasi lumbung pangan yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode analisis prospektif. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, serta perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi (Semiawan, 2010). Dalam pendekatan ini, peneliti perlu menjalin kedekatan dengan individu dan situasi yang diteliti untuk memahami secara mendalam realitas serta kondisi kehidupan nyata (Moh. Pabundu Tika, 2020).

Pendekatan kualitatif menekankan pada pemahaman makna, pola pikir, dan interpretasi dalam konteks situasi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Fokus utama pendekatan ini adalah pada proses, bukan hanya hasil akhir, sehingga rangkaian kegiatan dapat disesuaikan dengan kondisi dan temuan selama penelitian berlangsung. Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk memahami suatu konteks dan individu secara menyeluruh dalam perspektif holistik (Nora, 2022).

Metode analisis prospektif digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci dalam merumuskan model sistem kebijakan. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan berdasarkan kondisi saat ini. Pendekatan ini berbeda dengan peramalan karena kondisi saat ini tidak dapat secara langsung digunakan untuk memprediksi masa depan. Metode ini berbeda dengan peramalan karena situasi saat ini tidak dapat digunakan untuk memprediksi masa depan secara langsung. Istilah "*la prospective*" berasal dari bahasa Prancis dan dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan sebagai pendekatan yang bersifat preaktif dan proaktif, atau disamakan dengan istilah *foresight*. Dalam bahasa

Indonesia, istilah ini diartikan sebagai "tinjauan ke masa depan". Pendekatan prospektif menekankan pada evolusi jangka panjang, sehingga faktor waktu menjadi elemen penting. Analisis prospektif juga merupakan bagian dari metode yang menggunakan pendekatan sistem atau holistic (Suaedi, 2013).

Analisis prospektif dapat digunakan untuk merencanakan tindakan strategis dan menilai apakah perubahan perlu dilakukan di masa depan. Terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan dalam analisis prospektif, yaitu

- a. Mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang akan memengaruhi masa depan.
- b. Menetapkan tujuan strategis serta memahami kepentingan para aktor utama.
- c. Mendefinisikan serta menggambarkan kemungkinan evolusi masa depan.

Adapun tujuan dari analisis prospektif (Treyer (2003) dalam Suaedi, 2013), adalah sebagai berikut:

1. Mendefinisikan tujuan pembangunan jangka panjang dari sistem yang sedang dianalisis;
2. Menentukan strategi yang perlu diikuti untuk memastikan sistem tersebut dapat mencapai tujuan tersebut. Strategi ini mencakup serangkaian keputusan penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan serta memperkirakan kemungkinan interaksi yang akan timbul dari setiap keputusan; dan
3. Menerjemahkan strategi tersebut ke dalam rencana tindakan, termasuk tujuan umum. Analisis prospektif ini membantu menetapkan prioritas dalam proses perencanaan.

3.2. Subjek dan Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Tengah , dikhususkan pada Desa Pujokerto dan Desa Rejo Basuki. Ke-2 wilayah merupakan wilayah penyangga lumbung pangan berdasarkan ketetapan daerah, memiliki potensi komunitas petani milineal, dan kearifan-kearifan sosial pangan. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling terdiri dari 20 orang responden yaitu unsur pemerintah desa (8 orang), masyarakat lokal (4 orang), kelompok tani (6 orang) dan swasta (2 orang).

3.3 Instrumen Penelitian

Menggunakan angket survei, Forum Gorup Diskusi (FGD), pedoman wawancara, dokumentasi, observasi sebagai berikut:

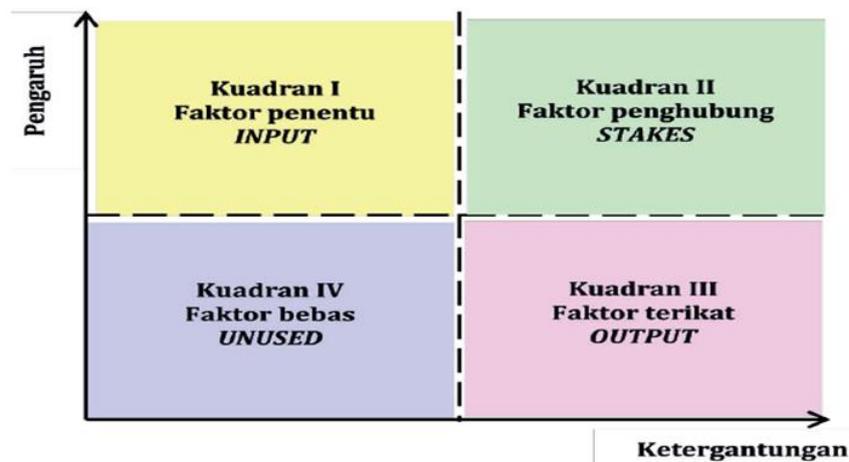
1. Survei *need assessment stakeholders* dikembangkan sendiri oleh peneliti berkaitan dengan faktor-faktor sistem pengembangan. Instrumen yang akan diisi oleh informan/responden secara offline;
2. Protokol Pedoman Wawancara dikembangkan ada dua macam, yaitu: Pedoman wawancara untuk memperoleh faktor-faktor transformasi melalui tematik *activity*. Mendapatkan informasi detail mengenai proses kebijakan dan agenda kebijakan yang selama ini berlangsung apakah beorientasi mutualis kapiial sosial dan *governace*;
3. Lembar observasi yang dikembangkan berupa lembar observasi terhadap tindakan desain pengambilan keputusan selama implementasi pengembangan. Lembar observasi akan berisi daftar *check* terhadap peran stakeholders-masyarakat petani dan fungsi-fungsi kelembagaan, organisasi dan manajemen, nilai/kapital sosial;
4. Forum *group* diskusi digunakan untuk penentuan faktor kapital sosial, institutional, organisasi-manajemen, menyusun skenario perubahan dan model skenario perubahan;
5. Dokumentasi dipergunakan melakukan tinjauan kebijakan/peraturan, indeks.

3.4 Teknik Analisis Penelitian

Pengolahan data dengan menggunakan analisis prospektif, analisis prospektif dikembangkan untuk menyediakan informasi tentang faktor-faktor kunci yang memengaruhi sistem, sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan yang terlibat. Penentuan faktor-faktor kunci dan tujuan strategis sangat penting dan sepenuhnya didasarkan pada pendapat para ahli yang berperan sebagai pemangku kepentingan. Pendapat ini diperoleh melalui kuesioner dan wawancara mendalam di area penelitian (Trayer 2000 dalam Suaedi, 2013).

Proses analisis:

1. Menentukan faktor kunci untuk masa depan dari sistem menggunakan matriks dan menggambarkan pengaruh dan ketergantungan dari masing-masing faktor ke dalam 4 kuadran utama (Gambar 2).



Gambar 3. Matrik Pengaruh dan Ketergantungan antar faktor

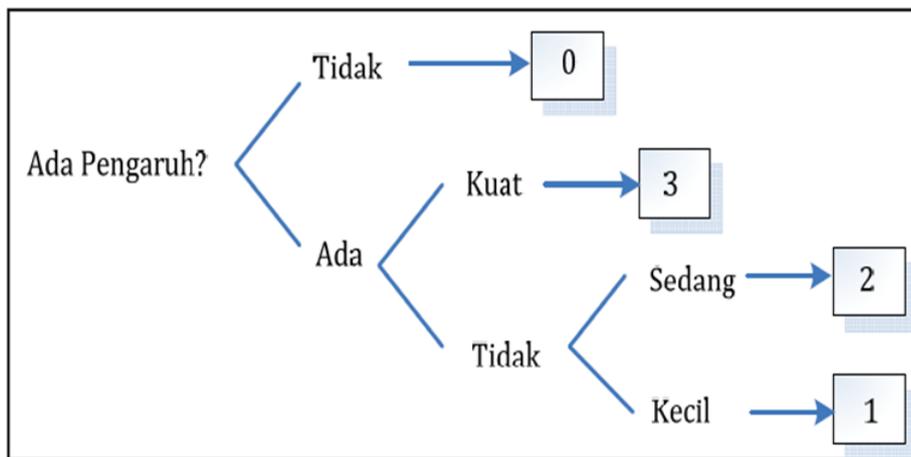
2. Menentukan tujuan strategis dan kepentingan utama para stakeholder yang terkait dengan sistem pengembangan Model sistem kebijakan transformasi lumbung pangan.
3. Menentukan pengaruh langsung antarfaktor dalam sistem, yang dilakukan pada tahap pertama analisis prospektif menggunakan matriks pengaruh langsung antarfaktor dalam pengembangan model sistem kebijakan transformasi lumbung pangan dan pengisian Skor matrik antara 0 (tidak ada pengaruh) dan 3 (pengaruh kuat) menggunakan kesepakatan.

Tabel 2. Pengaruh langsung antar faktor dalam model sistem kebijakan transformasi lumbung pangan.

Dari ↓ Terhadap →	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A	■									
B		■								
C			■							
D				■						
E					■					
F						■				
G							■			
H								■		
I									■	
J										■

A – Jadilah faktor-faktor dalam sistem yang dikaji

Mengisi matriks tersebut dilakukan bersama dengan stakeholder secara partisipatif. Skor pengisian antara 0 (tidak ada pengaruh) dan 3 (pengaruh kuat). Skor isian untuk seluruh responden dapat menggunakan kesepakatan. Jika tidak dapat titik temu, maka dapat menggunakan rata-rata, median, atau modus. Pedoman pengisian matriks analisis pengaruh disajikan pada Gambar 3.



Gambar 4. Pedoman Skor Pengisian Matrik

4. Mengidentifikasi identifikasi bagaimana elemen kunci dapat berubah dengan menentukan keadaan (*state*) pada setiap faktor, memeriksa perubahan mana yang dapat terjadi bersamaan, dan menggambarkan skenario dengan memasangkan perubahan yang akan terjadi dengan cara mendiskusikan skenario dan implikasinya terhadap sistem.
5. Menentukan keadaan (*state*) suatu faktor. Ketentuan-ketentuan yang harus diikuti pada tahap ini adalah (a) keadaan harus memiliki peluang sangat besar untuk terjadi (bukan khayalan) dalam suatu waktu di masa datang; (b) keadaan bukan merupakan suatu tingkatan atau ukuran suatu faktor, tetapi merupakan deskripsi tentang situasi dari sebuah faktor; (c) setiap keadaan harus diidentifikasi dengan jelas; (d) bila keadaan dalam suatu faktor lebih dari satu, maka keadaan-keadaan tersebut harus dibuat secara kontras; dan e) mengidentifikasi keadaan yang peluangnya sangat kecil untuk terjadi atau berjalan bersamaan (*mutual compatible*).
6. Membangun skenario melalui : skenario yang memiliki peluang besar untuk terjadi di masa datang, kombinasi dari faktor-faktor, skenario mulai dari alternatif paling optimis sampai alternatif paling pesimis, yang paling mungkin terjadi.
7. Merumuskan implikasi skenario melalui skenario yang terpilih pada tahap sebelumnya dibahas kontribusinya terhadap tujuan studi, didiskusikan implikasinya, dan menyusun rekomendasi kebijakan dari implikasi yang sudah disusun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Kampung Pujo Kerto dan Rejo Basuki di Lampung Tengah, dapat disimpulkan bahwa transformasi sistem lumbung pangan desa sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kapital sosial dan *Governance*.

1. Keputusan Rasional yang Didukung oleh Modal Sosial

Keputusan rasional yang diambil dalam pengelolaan lumbung pangan, seperti penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dan diversifikasi tanaman, didukung oleh modal sosial yang kuat. Masyarakat yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap pemerintah dan pengelola lumbung lebih cenderung berpartisipasi aktif dalam program ini, sehingga kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan dengan lebih efisien.

2. Partisipasi Masyarakat Meningkatkan Efektivitas Kebijakan

Nilai kebersamaan dan budaya gotong royong yang menjadi landasan modal sosial memperkuat keputusan rasional yang dibuat oleh pengambil kebijakan. Masyarakat yang terhubung melalui jaringan sosial dan partisipasi aktif dalam pengelolaan lumbung pangan membantu menurunkan biaya sosial dan meningkatkan keberhasilan kebijakan.

3. Sinergi dalam Pengelolaan Sumber Daya

Jaringan sosial yang dibangun melalui kelompok tani dan BUMDes mendukung keberlanjutan kebijakan lumbung pangan. Dengan adanya kolaborasi antara individu, kelompok, dan lembaga pemerintah, pengelolaan pangan menjadi lebih efektif dan resilient terhadap tantangan eksternal, seperti perubahan iklim.

5.2 Saran

1. Penguatan Kepercayaan dan Partisipasi Masyarakat

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan lumbung pangan akan memperkuat keberlanjutan program. Lumbung pangan dikelola dengan sistem pencatatan manual atau digital yang memungkinkan masyarakat memantau langsung stok dan distribusi pangan, hal ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan stok pangan.

2. Memperkuat Norma Gotong Royong dan Solidaritas Sosial

Norma sosial seperti gotong royong dan solidaritas sosial sangat penting untuk memastikan keberhasilan kebijakan lumbung pangan, terutama dalam situasi krisis pangan dengan melibatkan masyarakat dalam aktivitas bersama seperti pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi stok pangan. Kegiatan ini dapat difasilitasi melalui pertemuan rutin di desa yang didukung oleh perangkat desa.

3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Jaringan Sosial

Mengoptimalkan jaringan sosial melalui kelompok tani, swasta dan BUMDes untuk memperkuat sistem pengelolaan lumbung pangan. Kelompok tani bisa menjadi platform yang efektif untuk mendistribusikan informasi terkait teknik pertanian berkelanjutan, akses ke pasar, serta dukungan sosial yang diperlukan untuk ketahanan pangan.

4. Penguatan Tata Kelola (*Governance*) yang Responsif

Governance yang responsif dan transparan sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan lumbung pangan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan tantangan eksternal, seperti perubahan iklim. Untuk itu, pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas mereka dalam merespons dinamika sosial-ekonomi dan perubahan iklim melalui kebijakan yang fleksibel dan adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- (Ariani & Suryana, 1611; Asiva Noor Rachmayani, 2015; Bappenas, 2015; Busri et al., 2023; Chaireni et al., 2020; Cofré-Bravo et al., 2019; Djamaludin Ancok, 2022; Fachruddin, 2013; Hartatik et al., 2023; Hulu & Muhammad Husni Thamrin, 2022; Karyadi, 2021; Kerr et al., 2022; Luna et al., 2015; MacRae & Reuter, 2020; Mashur & Zulkarnaini, 2022; Mensah & Frimpong, 2024; Nain, 2018; Pramudita et al., 2020; Presiden RI, 2021; Santoso, 2020; Savolainen Reijo.Savolainen@uta.fi, 2017; Simarmata, 2019; Tranggono, R. Moch. Januar Ibnu Akbar, 2023; Ulfa Aryani et al., 2024) Ariani, M., & Suryana, A. (1611). Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12550, Indonesia 2 Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler. *Badan Riset Dan Inovasi Nasional Jalan Gatot Subroto*, 21(1), 1–20.
<http://dx.doi.org/10.21082/akp.v21n1.2023.1-20>
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析* Title.
- Bappenas. (2015). Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. *Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional*, 2015–2019.
- Busri, Ihyani Malik, & Nur Wahid. (2023). Implementasi Agile Governance pada Reformasi Birokrasi 4.0 di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 85–119. <https://doi.org/10.52316/jap.v19i1.134>
- Chaireni, R., Agustanto, D., Wahyu, R. A., & Nainggolan, P. (2020). Ketahanan Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1(2), 70–79.
<http://jkpl.pjj.unp.ac.id/index.php/JKPL/article/view/13>
- Cofré-Bravo, G., Klerkx, L., & Engler, A. (2019). Combinations of bonding, bridging, and linking social capital for farm innovation: How farmers configure different support networks. *Journal of Rural Studies*, 69(April), 53–64. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.04.004>
- Djamaludin Ancok. (2022). Membangun Kepercayaan Menuju Indonesia Madani, Demokratis Dan Damai (Sebuah Tinjauan Psikologi Sosial). *Buletin Psikologi*, 10(2), 20–21.
- Fachruddin, S. (2013). *Metode Kuantitatif Untuk Analisis Kebijakan*. March, 73.
- Hartatik, E. S., Wasino, Handayani, T., & Sudarsih, S. (2023). Village Barn in Coastal Area of Java, From “Lumbung Desa” to Village Unit Cooperative in Demak-Grobogan. *Paramita*, 33(2), 280–291.
<https://doi.org/10.15294/paramita.v33i2.43880>

- Hulu, L., & Muhammad Husni Thamrin. (2022). Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat Melalui Lumbung Pangan Di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 1(2), 1–7. <https://doi.org/10.32734/jkakp.v1i2.9143>
- Karyadi, L. W. (2021). The Existence and Role of Indigenous Food Institution on Strengthening Foods Security of Rural Community. *International Journal Papier Public Review*, 2(1), 54–66. <https://doi.org/10.47667/ijppr.v2i1.73>
- Kerr, R. B., Liebert, J., Kansanga, M., & Kpienbaareh, D. (2022). Human and social values in agroecology: A review. *Elementa*, 10(1), 1–24. <https://doi.org/10.1525/elementa.2021.00090>
- Luna, A. J. H. de O., Kruchten, P., & de Moura, H. P. (2015). *Agile Governance Theory: conceptual development*. 1–22. <http://arxiv.org/abs/1505.06701>
- MacRae, G., & Reuter, T. (2020). Lumbung Nation: Metaphors of food security in Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 48(142), 338–358. <https://doi.org/10.1080/13639811.2020.1830535>
- Mashur, D., & Zulkarnaini. (2022). Analisis Prospektif Strategi Pengembangan Ekowisata Di Kawasan Pesisir Pantai. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 39–44. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/7984%0Ahttps://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/download/7984/6822>
- Mensah, L., & Frimpong, L. K. (2024). *Habitat Internasional Modal sosial dan pembangunan berbasis komunitas : Analisis multi-kelompok mengenai pemukiman informal migran dan masyarakat adat di Greater Accra , Ghana*. 145(September 2023).
- Nain, U. (2018). Transformasi Lumbung Desa: Evaluasi Program Raskin dan Rastradi Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 5(1), 85. <https://doi.org/10.22146/jps.v5i1.35404>
- Pramudita, M., Anggraini, D. D., Hidayat, N., Yuniardiningsih, E., Apriliyanti, M. D., Wangi, P., & Ma'rufi, I. (2020). Lumbung Pangan Sebagai Upaya Ketangguhan Pangan Masa Pandemi Covid-19 Desa Kabuaran Bondowoso. *Multidisciplinary Journal*, 3(1), 34. <https://doi.org/10.19184/multijournal.v3i1.23685>
- Presiden RI. (2021). Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260). *Bpk.Go.Id*, 1–11. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/188354/perpres-no-104-tahun-2021>
- Santoso, T. (2020). *Memahami Modal Sosial CORE View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk provided by Scientific Repository*.
- Savolainen Reijo.Savolainen@uta.fi, R. (2017). Information need as trigger and driver of information seeking: a conceptual analysis. *Aslib Journal of Information Management*, 69(1), 2–21. <http://10.0.4.84/AJIM-08-2016->

0139%0Ahttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=llf&AN=120950687&site=ehost-live

Simarmata, T. (2019). Percepatan Transformasi Inovasi dan Teknologi Pertanian Milenial untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Indonesia. *Proceedings of Professor Summit 2019*. *Issn: 2685-4465.*, January, 461–469.

Tranggono, R. Moch. Januar Ibnu Akbar, V. Z. R. P. (2023). Krisis Ketahanan Pangan Penyebab Ketergantungan Impor Tanaman Pangan di Indonesia. *AZZAHRA: Scientific Journal of Social Humanities*, 1, 73–81.

Ulfa Aryani, Z., Tua Ricky Fredy Simanjuntak, H., & Mashur, D. (2024). Analisis Prospektif Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Revolusi Industri 4.0 Pada BAPPEDALITBANG. *Publika : JIAP*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.14153>